

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 07 Januari 2011

Subyek : Bencana Alam

Hal : 19

PEMBIAYAAN Utang UKM Korban Bencana Diputihkan

Jakarta, Kompas - Utang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah korban bencana alam dapat dihapuskan. Selain itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga akan melakukan program perkuatan dan bantuan sosial bagi koperasi dan UKM yang terkena dampak bencana alam, seperti di Provinsi DI Yogyakarta, Mentawai (Sumatera Barat), dan Wasior (Papua).

Demikian disampaikan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pariaman Sinaga di Jakarta, Kamis (6/1).

Sebelumnya, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan BI Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Dalam peraturan tersebut disebutkan, antara lain, ada tiga hal yang dapat dilakukan perbankan untuk debitor yang terkena bencana alam. Pertama, merestrukturisasi kredit yang terkendala dampak bencana, tetapi masih memiliki prospek baik, dan kredit hasil restrukturisasi ditetapkan dengan kolektibilitas lancar.

Kedua, menaikkan batas penilaian kualitas aktiva produktif menggunakan pilar ketepatan pembayaran, yang secara normal untuk kredit Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar. Ketiga, memberikan tambahan fasilitas kredit baru jika diperlukan kepada debitor yang terkena dampak bencana.

Sementara penghapusan utang yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan antara lain dengan pemutihan atau penghapusan pinjaman terhadap koperasi dan UMKM yang mendapat dana bergulir yang menjadi korban bencana alam.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, tahun 2000-2007, ada 238 koperasi yang mengikuti program perkuatan modal dengan total nilai Rp 25,05 miliar.

Selain itu, ada juga program bantuan sosial kelompok perempuan dan kelompok pemuda yang bukan pinjaman dan tidak harus dikembalikan sebanyak 49 koperasi dengan nilai Rp 2,45 miliar.

"Kami mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan. Tidak perlu dikembalikan. Artinya, dana yang sudah bergulir dan kini hancur akibat bencana dihibahkan kepada mereka," kata Pariaman.

Kementerian Koperasi dan UKM juga menyalurkan bantuan perkuatan modal pada 2000- 2010 kepada 52 koperasi di Provinsi DI Yogyakarta (Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo), serta Jawa Tengah (Magelang, Boyolali, dan Klaten). Total nilainya Rp 45,56 miliar.

Sebelumnya, dalam jumpa pers akhir tahun 2010, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan menduga 26 koperasi terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi. Bantuan perkuatan modal yang diusulkan dihapuskan utangnya Rp 13,77 miliar.

"Kami mengusulkan agar perusahaan penjamin kredit dapat membayar klaim debitor kredit usaha rakyat di daerah bencana," ujar Syarifuddin. (OSA)